



PAPER – OPEN ACCESS

## Analisis Peran Relawan Demokrasi Basis Pemilih Disabilitas Dalam Menaikkan Tingkat Kepedulian Partisipasi Politik di Kota Medan Pada Pemilihan Umum 2019

Author : Mas Indra Putra Alamsyah dan Arif Nasution  
DOI : 10.32734/lwsa.v3i3.917  
Electronic ISSN : 2654-7066  
Print ISSN : 2654-7058

*Volume 3 Issue 2 – 2020 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



# Analisis Peran Relawan Demokrasi Basis Pemilih Disabilitas Dalam Menaikkan Tingkat Kepedulian Partisipasi Politik di Kota Medan Pada Pemilihan Umum 2019

Mas Indra Putra Alamsyah, Arif Nasution

*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara*

[indraafimira@gmail.com](mailto:indraafimira@gmail.com), [arifnasution2010@yahoo.com](mailto:arifnasution2010@yahoo.com)

## Abstrak

Indeks suksesnya Pemilihan umum adalah meningkatnya kepedulian masyarakat dalam memilih, semakin besar jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya maka dapat diindikasikan pelaksanaan Pemilu telah sukses secara prosedural dan pemerintahan yang terpilih nantinya diyakini akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Melalui program Relawan Demokrasi (Relasi) yang lahir pada Tahun 2014, sikap dan pandangan negatif masyarakat terhadap politik khususnya Pemilu diharapkan akan bergeser ke arah yang positif karena Pemilu sebagai manifesto demokrasi sejatinya adalah suatu pergerakan sikap politik rakyat terhadap situasi negara dan hasilnya juga untuk rakyat. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan tiga indikator yakni peran, sosialisasi politik dan partisipasi politik. Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap subjek penelitian dan kajian literasi serta pengarsipan. Dalam pemilihan subjek penelitian menggunakan metode purposive sampling. Hasil pencarian tulisan menemukan jika Relasi mempunyai kedudukan yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan demokrasi dan kepemiluan kepada basis pemilih disabilitas melalui kegiatan sosialisasi dan selalu berpegang pada kode etik. Peran Relasi dinilai sudah cukup baik dibuktikan dengan proses sosialisasi dapat tercapai dan relatif lancar. Disamping itu semakin meningkatnya kepercayaan pemilih disabilitas terhadap proses demokrasi dengan menyatakan akan siap hadir pada hari pemilihan

*Kata Kunci:* Relawan Demokrasi; Relasi; Sosialisasi Politik;

## 1. Pendahuluan

Salah satu indikator suksesnya Pemilihan Umum (Pemilu) adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih, semakin besar jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya maka dapat diindikasikan pelaksanaan Pemilu telah sukses secara prosedural dan pemerintahan yang terpilih nantinya diyakini akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) berperan besar dalam meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat untuk memilih secara sadar, rasional dan suka rela yang tentu jika disandingkan dengan keadaan saat ini akan berhadapan dengan paradigma negatif yang berkembang di tengah masyarakat tentang Pemilu yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik.

Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting jika melihat dari beberapa gelaran Pemilu khususnya PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) WaliKota dan Wakil WaliKota Medan dan Gubernur Tahun 2015 dan 2018, tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih sangat memperhatikan dimana jumlahnya hanya sebesar 507.351 jiwa atau 25,38 % dengan jumlah pemilih yang golput sebesar 1.491.484 jiwa atau 74,62%. Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) angka partisipasi mengalami sedikit kenaikan sebesar 916.109 jiwa atau 55,80% dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 725.539 jiwa atau 44,20%. Sedangkan untuk partisipasi pemilih disabilitas, pada Pilgub 2018 angkanya mencapai 412 jiwa atau 86,01%.

Pencerdasan masyarakat akan pendidikan Pemilu dan demokrasi dianggap penting bahkan sangat urgent karena dengan kedua hal tersebut diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (Pemilu) yang dilaksanakan oleh negara melalui lembaga terkait dalam hal ini KPU yang serta merta akan membangkitkan rasa sukarela masyarakat untuk ikut dan peduli pada agenda Pemilu.

Program Relawan Demokrasi (Relasi) yang lahir pada Tahun 2014 disebabkan oleh tingkat partisipasi dalam memilih yang cenderung menurun yang berkaca dari empat Pemilihan umum terakhir dan penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah menunjukkan indikasi tersebut. Saat gelaran Pemilihan umum misalnya, pada Tahun 1999 angka partisipasi sebesar 92%, Pemilu 2004 angkanya turun menjadi 84%, Pemilu 2009 semakin menurun menjadi 71%, terakhir Pemilu 2014 naik sedikit menjadi 75%.

Melalui Relasi, angka partisipasi diharapkan semakin naik dan sikap dan pandangan negatif masyarakat terhadap politik khususnya Pemilu diharapkan akan bergeser ke arah yang positif karena Pemilu merupakan manifesto demokrasi yang sejatinya adalah suatu pergerakan sikap politik rakyat terhadap situasi negara dan hasilnya juga untuk rakyat. Bila event Pemilu dapat digunakan oleh rakyat dalam memilih para wakilnya yang baik untuk duduk di kursi pemerintahan maka rakyat akan menerima buah hasil dari pilihan mereka sendiri dalam bentuk kesejahteraan dan kemakmuran. KPU menggagas Program Relawan Demokrasi yang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari sebelas basis pemilih strategis yaitu : (1) Basis keluarga, (2) Basis pemilih pemula, (3) Basis pemilih muda, (4) Basis pemilih perempuan, (5) Basis pemilih disabilitas, (6) Basis pemilih berkebutuhan khusus, (7) Basis kaum marginal, (8) Basis komunitas, (9) Basis keagamaan, (10) Basis warga net dan (11) basis relawan demokrasi. Para Relasi yang telah terdapat di setiap basis pemilih selanjutnya akan menyuluhkan ke setiap basis atau komunitasnya dengan masa kerja selama tiga bulan. Yang dimaksud relasi disini adalah Relasi basis partisipasi disabilitas dimana berperan sebagai agen pelopor demokrasi dan sebagai perpanjangan tangan KPU dalam memperluas sosialisasi pendidikan Pemilu dan demokrasi. di komunitasnya.

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Lebih lanjut disebutkan lagi bahwa bagi penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk memilih anggota legislatif, Presiden /Wakil Presiden, DPRD dan Penyelenggara Pemilu.

Untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, maka Relasi basis pemilih disabilitas dituntut memahami perannya sebagai penyuluh Pemilu di tengah-tengah masyarakat. Peran Relasi merupakan tuntutan karakter yang dibawa dan diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan tuntutan karakter tersebut.

Tuntutan karakter muncul dari orang-orang sekitar agar peran dapat dimainkan sesuai dengan defenisinya dan agar terhindar dari penyimpangan peran tentunya. Ada empat hal yang diperhatikan dalam peran yaitu : (1) masyarakat yang terlibat dalam interaksi peran, (2) Kedudukan masyarakat tersebut, (3) Kaitan atau hubungan, (4) Prilaku yang muncul dari interaksi peran tersebut (Edy, 1994). Tulisan ini juga memfokuskan perhatiannya pada partisipasi politik yang menjadi salah satu output dari gelaran Pemilu. Partisipasi politik yang dimaksud adalah kegiatan individu atau kelompok dalam pemberian suara di Pemilu secara sukarela, rasional dan sadar.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi tersebut, tentu memerlukan suatu metode atau cara-cara sosialisasi yang tepat agar dapat menjangkau dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat dalam hal ini sebagai target sosialisasi. Terdapat dasar-dasar sosialisasi perlu diperhatikan yang perlu diperhatikan antara lain : (1) Pelaku sosialisasi, (2) Materi, (3) Interaksi. (Haryanto, 2018). Hal ini bertujuan agar proses sosialisasi tersebut berhasil seperti yang diharapkan.

## 2. Metode Penelitian

Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan Sumber data yang diperoleh melalui wawancara terhadap subjek penelitian dan studi literasi serta dokumentasi. Dalam pemilihan subjek penelitian menggunakan metode purposive sampling. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang” (Moleong, 2017).

Dalam Relasi berbasis pemilih disabilitas terdapat lima orang relawan, dari lima orang tersebut dipilihlah informan yang dinilai paling mengerti tentang hal disabilitas. Informan yang dimaksud adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB) Pembina Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) dan beliau adalah Ketua Pusat Pemilhan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Provinsi Sumatera Utara saat ini. Dalam tulisan ini difokuskan pada analisis peran Relasi yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator yakni sosialisasi politik, partisipasi politik dan peran.

## 3. Kajian Pustaka

### 3.1. Konsep Sosialisasi Politik, Partisipasi Politik dan Peran

Menurut Dannis Kavanagh (Haryanto, 2018:13) sosialisasi politik adalah suatu proses sosialisasi politik individu agar mampu membentuk budaya politik di masyarakat dalam konteks mengubah atau melestarikannya. Ketika masyarakat dapat memperoleh nilai, keyakinan, sikap atau perilaku politik hal tersebut menjadi kesatuan dari sebuah proses pembentukan budaya politik.

Sedangkan Levine dalam (Haryanto, 2018:13) menafsirkan sosialisasi politik yaitu suatu proses sosialisasi kehidupan politik. Jika Dannis mengkontekstkan sosialisasi politik pada pembentukan budaya politik sedangkan Levine mengkontekstkan pada cara pandang tentang penguasa yang ada, partisipasi, aktivitas, toleransi politik. serta kepatuhan hukum.

Walaupun berbeda fokus atau titik pendapat namun kedua pendapat ahli tersebut memiliki kesamaan penekanan yaitu bahwa sosialisasi politik merupakan upaya untuk melestarikan budaya politik sebagai nilai penting bagi masyarakat demi terciptanya partisipasi aktif dari individu terhadap proses-proses politik.

Salah satu aspek penting dari demokrasi yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Apapun keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Huntington dan Nelson (1994:4) mengungkapkan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara dengan tujuan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan pemerintah.

Hal senada dijelaskan oleh Miriam Budiardjo partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang, atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dsb (Merphin Panjaitan, 2011:73).

Dengan demikian, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh para penyelenggara negara melalui berbagai tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, bergabung dengan kelompok kepentingan atau lembaga politik, mencari kandidat dan/atau mencalonkan diri sebagai kandidat penyelenggara negara, menjalin komunikasi dengan pejabat negara, demonstrasi, kampanye, dan sebagainya.

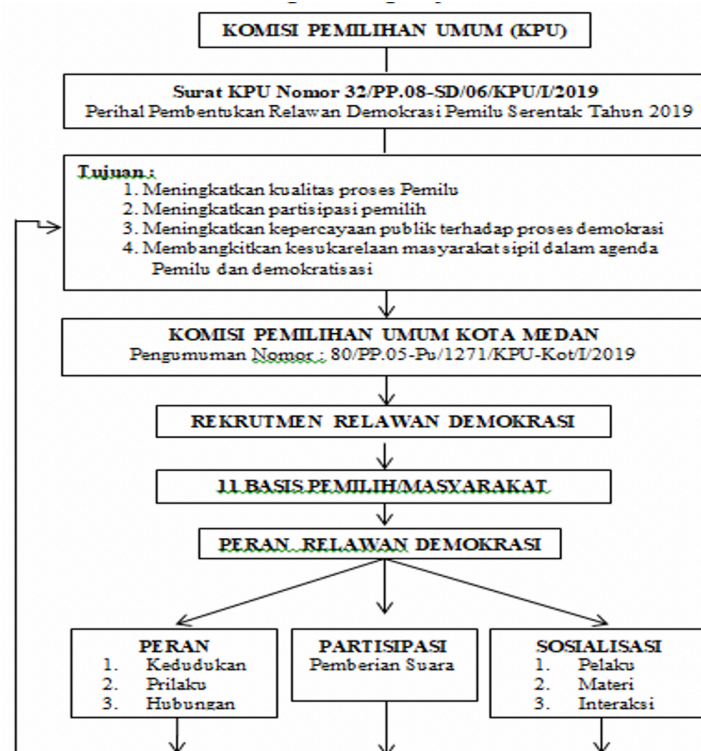
Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (Edy. S, 1994).

Peran berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

#### 4. Temuan dan Analisis

##### 4.1. Relasi Basis Pemilih Disabilitas

Melalui Surat KPU Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 yang dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan menyebutkan bahwa tujuan pembentukan program Relasi adalah sebagai upaya untuk mengoptimalkan kualitas Pemilu dan partisipasi pemilih serta menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap demokrasi sehingga menciptakan rakyat yang sadar dan suka rela untuk memilih. Gambaran Umum Pengelolaan Logistik pada Pemilu 2019.



Gambar 1. Struktur Konsep Peran Relasi

Berdasarkan rapat pleno KPU Kota Medan tanggal 17 Januari 2019 yang terdapat dalam Berita Acara Nomor : 28/PP.01.BA/1271/KPU-Kot/I/2019 menghasilkan pengumuman dengan Nomor : 80/PP.05-Pu/1271/KPU-Kot/I/2019 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Tingkat Kota Medan. Dalam berita tersebut didapatlah 55 nama-nama yang dinyatakan lulus sebagai Relasi.\*

Diantara basis-basis Relasi diantaranya adalah Relasi basis pemilih disabilitas yang terdiri dari : (1) M. Ardiansyah, (2) Dra. Jenni Heryani, (3) Meira Wandina Nasution, (4) Muhammad Yusuf, (5) Marlina Sihombing). Relasi basis pemilih disabilitas kemudian menjadi mitra KPU untuk menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bentuk peran masyarakat diharapkan mampu kesadaran masyarakat untuk menggunakan haknya dalam Pemilu secara maksimal.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan melalui wawancara terhadap subjek penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan arah mekanisme kerja, Relasi basis pemilih disabilitas mendapatkan pembekalan dari pihak KPU Kota Medan berupa bimbingan teknis (bimtek) sebanyak satu kali setelah resmi dilantik menjadi Relasi. Dalam bimtek tersebut Relasi basis pemilih disabilitas diberikan pengarahan dan pengenalan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah peran Relasi seperti mekanisme kerja, kode etik, tujuan dan lainnya, selain itu juga dibagikan brosur dan buku panduan kerja. Mengenai hal-hal lebih lanjut KPU Kota Medan membuka jalur komunikasi via grup *whatsapp* guna memperlancar arus informasi dan komunikasi antara KPU Kota Medan dan para Relasi.

Tujuan dari bimtek tersebut adalah agar Relasi basis pemilih disabilitas dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih terarah pada target segmen pemilihnya. Selain berisi arahan kerja, kegiatan bimtek diakui telah menambah pengetahuan dan informasi tentang basis pemilih disabilitas. Maksud menambah disini adalah jauh sebelum menjadi Relasi, subjek adalah staf pengajar di salah satu SLB sehingga sudah terbiasa dengan hal-hal yang menyangkut disabilitas, selain itu salah seorang dari anggota Relasi adalah juga penyandang disabilitas tuna rungu ringan.

Sebagai mitra lembaga penyelenggara Pemilu yang independen, Para Relasi basis pemilih disabilitas menyadari bahwa mereka adalah penyuluh Pemilu sesuai yang diamanatkan oleh KPU yang tertuang dalam Surat Ketetapan (SK) Kerja. Agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan, Relasi basis pemilih disabilitas wajib untuk mematuhi kode etik yang telah ditetapkan yaitu: (1) Bersikap independen, imparial dan non partisan terhadap peserta Pemilu, (2) Bersikap sopan santun dan berperilaku baik, (3) Menghormati adat istiadat setempat (4) Tidak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu, (5) Tidak menerima suap dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu.

Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Relasi basis pemilih disabilitas selalu menjaga kode etik, hal ini ditegaskan dalam setiap kegiatan sosialisasi selalu berpedoman pada tugas dan fungsi serta menghindari hal-hal yang dilarang seperti mengkampanyekan seseorang atau partai politik tertentu. Saat menjumpai basis pemilihnya, Relasi mengedepankan metode yang cermat dan komunikasi yang persuasif, hal ini dimaklumi karena basis pemilih relasi merupakan pemilih disabilitas yang memerlukan pola sosialisasi dan komunikasi yang lebih "dekat" agar materi-materi sosialisasi dapat dipahami dan dimengerti oleh basis pemilih. Hal ini tentu bukan hal yang mudah, namun berbekal kecermatan dan latar belakang menghadapi kaum disabilitas, kegiatan sosialisasi dapat terlaksana dengan lancar sehingga tercipta hubungan yang baik antara relasi dan pemilih di setiap kegiatan sosialisasi.

Relasi menilai, terciptanya hubungan yang baik bukan hanya mempermudah dalam mentransfer materi-materi sosialisasi, namun lebih jauh, hal ini dapat menciptakan sebuah hubungan kejiwaan yang akrab sehingga komunikasi dalam hal ini kaum disabilitas dapat lebih leluasa mengekspresikan pikiran dan hatinya yang mungkin selama ini tidak mau *share* atau mengkomunikasikan kepada orang lain.

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan (Sarlito, 2015) yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial,
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut,
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku,
4. Kaitan antara orang dan perilaku orang yang berperan.

Relasi dan pemilih disabilitas merupakan orang-orang yang terlibat dalam interaksi kegiatan sosialisasi Pemilu. Relasi menyadari sepenuhnya bahwa mereka merupakan penyuluh Pemilu dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap pemilih disabilitas akan pentingnya Pemilu sebagai agenda demokrasi. Pola sosialisasi dan komunikasi yang tepat terhadap pemilih disabilitas membuka batasan-batasan pikiran dan hati yang mungkin selama ini ada keengganan untuk mengkomunikasikan dengan orang lain.

#### 4.2. Sosialisasi Pemilu 2019

Dalam melaksanakan sosialisasi, Relasi basis pemilih disabilitas menggunakan berbagai pola atau metode yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yakni : (1) Simulasi, (2) Bermain (3) Diskusi tanya jawab kelompok, (4) Ceramah, (5) Alat bantu, (6) Kuis, (7) Posting materi sosialisasi ke media sosial. Sedangkan ruang lingkup kerjanya meliputi : (1) Tuna Rungu, (2) Tuna Netra,

(3) Tuna Daksa, (4) Tuna Grahita dan (5) Gangguan jiwa. Namun untuk gangguan jiwa, sosialisasi belum dapat terlaksana dikarenakan sesuatu hal di luar pihak Relasi.

Relasi basis pemilih disabilitas sebelumnya mendapatkan bahan-bahan sosialisasi dari KPU Kota Medan yang dalam prakteknya dikembangkan secara mandiri dan disesuaikan dengan target basis pemilih masing-masing. Materi-materi yang tersebut antara lain tentang demokrasi, kekuasaan, Pemilu dan partisipasi. Sosialisasi materi demokrasi dan kekuasaan berisi tentang defenisi dan proses kekuasaan, hasil yang ingin dicapai yaitu pemilih dapat mengetahui dan sadar pentingnya demokrasi sebagai suatu proses pencapaian sebuah kekuasaan. selain itu, minimal pemilih disabilitas mengetahui lembaga-lembaga tinggi negara dan mengerti tugas serta fungsinya.

Untuk materi Pemilu dan partisipasi diajarkan tentang defenisi Pemilu dan tata cara menggunakan hak pilih, selain itu diajarkan juga bagaimana tata cara pemungutan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu, proses ini tentunya melalui pola penyampaian yang menyesuaikan dengan kondisi pemilih disabilitas. Materi Pemilu dianggap paling krusial, karena dengan materi ini diharapkan para pemilih disabilitas mendapat kesadaran akan pentingnya menggunakan hak untuk memilih dan hak untuk mengetahui proses Pemilu. Jadi bukan hanya mengajak untuk menggunakan hak pilih namun lebih jauh bagaimana pemilih disabilitas dapat mengikuti keseluruhan tahapan Pemilu sebagai bentuk kepedulian terhadap Pemilu.

Selain itu, melalui sosialisasi materi Pemilu diharapkan pemilih disabilitas dapat mengerti syarat-syarat untuk memilih, cara memastikan dirinya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga memastikan dirinya akan hadir di TPS serta tata cara pemberian suara yang benar. rangkaian proses sosialisasi tersebut muaranya adalah terciptanya persepsi positif terhadap penyelenggaraan Pemilu dan terbentuknya pemilih yang cerdas. Sosialisasi materi demokrasi, kekuasaan, Pemilu dan partisipasi adalah bagian dari sosialisasi materi politik dalam upaya pembentukan budaya politik melalui proses pembelajaran politik sehingga dapat mengubah budaya sebelumnya atau melestarikannya (Haryanto, 2018:13).

Relasi basis pemilih disabilitas merupakan pelaku dari sosialisasi Pemilu atau politik, dengan berbekal materi-materi Pemilu melakukan sebuah interaksi atau hubungan terhadap pemilih disabilitas atau target materi. Hasil interaksi kedua belah pihak menghasilkan suatu hubungan yang positif sehingga proses sosialisasi dapat tercapai dan relatif lancar. Disamping itu semakin meningkatnya kepercayaan pemilih disabilitas terhadap proses demokrasi dengan menyatakan akan siap hadir pada hari H (17 April) nanti.

Hal ini senada yang diungkapkan oleh Langton dalam Haryanto, (2018:25) yang menyebutkan bahwa proses sosialisasi politik memerlukan beberapa elemen pertama, agen atau aktor sebagai pelaku pemberi sosialisasi. Kedua, materi atau isi sosialisasi politik dan kontennya tidak selalu politik. Ketiga, interaksi yang bermakna harus ada hubungan antara pelaku dengan target sosialisasi dan interaksi sangat menentukan berhasilnya sosialisasi tersebut apakah diterima atau ditolak.

Dalam operasionalnya, Relasi basis pemilih disabilitas bergerak melakukan sosialisasi ke beberapa SLB di Kota Medan diantaranya SLB Karya Wisata dan SLB Karya Murni yang sekali kunjungan jumlah pesertanya ditetapkan sebanyak 30 orang saja karena keterbatasan anggaran. Selain SLB, Relasi basis pemilih disabilitas juga mengadakan kunjungan ke beberapa organisasi disabilitas diantaranya Himpunan Wanita Disabilitas, Persatuan Tuna Netra Indonesia, Gerakan Kaum Tuli Indonesia, Persatuan Penyandang disabilitas Indonesia, Ikatan Persaudaraan Tuna Netra Aceh dan ada juga sistem *door to door* menasar pemilih disabilitas yang dikenal atau diketahui sebelumnya.

Untuk memaksimalkan partisipasi peserta di setiap kunjungannya, Relasi basis pemilih disabilitas membagi-bagikan hadiah ringan berupa payung, handuk, cangkir dan lainnya serta uang *transport* kepada masing-masing peserta. hal ini tentu disesuaikan dengan anggaran yang relatif terbatas.

#### 4.3. Partisipasi Pemilu 2019

Miriam Budiardjo dalam (Merphin Panjaitan, 2011) mengungkapkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang, atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam Pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Bedasarkan DPT, pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Medan sebanyak 1250 jiwa yang terdiri dari 484 pria dan 766 wanita. Saat hari pemilihan, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 466 jiwa dengan perincian 210 laki-laki dan 256 perempuan atau 43,39% laki-laki dan 33,42% perempuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemilih disabilitas dari gender laki-laki lebih banyak menggunakan hak pilihnya dibandingkan perempuan. Hal tersebut tentu punya alasan yang menarik dan sangat tepat untuk tema penelitian berikutnya.

Tabel 1. Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Kota Medan Pemilu 2019 (Sumber : Data KPU Kota Medan (diolah))

NO	DAPIL	KECAMATAN	DATA			PENGGUNA HAK			TINGKAT PARMAS		
			PEMILIH DISABILITAS			PILIH DISABILITAS			DISABILITAS (%)		
			L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	1	MEDAN HELVETIA	47	85	132	7	8	15	14,89%	9,41%	11,36%
2	1	MEDAN BARAT	6	4	10	6	4	10	100%	100%	100%
3	1	MEDAN BARU	17	21	38	17	19	36	100%	90,48%	94,74%
4	1	MEDAN PETISAH	31	33	64	29	32	61	93,55%	96,97%	95,31%
5	2	MEDAN DELI	8	10	18	3	4	7	37,50%	40,00%	38,89%
6	2	MEDAN BELAWAN	17	23	40	17	23	40	100%	100%	100%
7	2	MEDAN MARELAN	14	13	27	6	3	9	42,86%	23,08%	33,33%
8	2	MEDAN LABUHAN	21	50	71	5	4	9	23,81%	8,00%	12,68%
9	3	MEDAN TEMBUNG	20	25	45	19	23	42	95,00%	92,00%	93,33%
10	3	MEDAN PERJUANGAN	19	32	51	11	19	30	57,89%	59,38%	58,82%
11	3	MEDAN TIMUR	9	12	21	4	5	9	44,44%	41,67%	42,86%
12	4	MEDAN KOTA	41	30	71	12	10	22	29,27%	33,33%	30,99%
13	4	MEDAN DENAI	3	7	10	3	7	10	100%	100%	100%
14	4	MEDAN AMPLAS	21	30	51	19	26	45	90,48%	86,67%	88,24%
15	4	MEDAN AREA	28	40	68	11	18	29	39,29%	45%	42,65%
16	5	MEDAN SUNGGAL	6	7	13	6	7	13	100%	100%	100%
17	5	MEDAN TUNTUNGAN	20	25	45	20	24	44	100%	96,00%	97,78%
18	5	MEDAN JOHOR	132	300	432	0	6	6	0,00%	2,00%	1,39%
19	5	MEDAN MAIMUN	7	5	12	4	5	9	57,14%	100%	75,00%
20	5	MEDAN POLONIA	5	3	8	5	3	8	100%	100%	100%
21	5	MEDAN SELAYANG	12	11	23	6	12	18	50,00%	54,55%	57,17%
<b>JUMLAH</b>			<b>484</b>	<b>766</b>	<b>1250</b>	<b>210</b>	<b>256</b>	<b>466</b>	<b>43,39%</b>	<b>33,42%</b>	<b>37,28%</b>

Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yakni Pilgub Tahun 2018 selisihnya tidak mencolok yakni sebanyak 54 jiwa. Pada Pilgub Tahun 2018 jumlah DPT pemilih disabilitas sebanyak 479 jiwa yang terdiri 214 laki-laki dan 265 perempuan. Sedangkan pengguna hak pilihnya sebanyak 412 jiwa dengan rincian 181 laki-laki dan 231 perempuan.

Tabel 2. Data dan Pemilih Disabilitas Kota Medan Pilgub 2018 (Sumber : Data KPU Kota Medan)

DATA PEMILIH DISABILITAS			PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS		
L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
214	265	479	181	231	412

Jika dicermati lebih dalam, pada gelaran Pilgub 2018 jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih selisihnya hanya 67 jiwa. Sedangkan pada Pemilu 2019 jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih selisihnya mencapai 784 jiwa, artinya pengguna hak pilih di Pemilu 2019 sangat kecil dibandingkan Pilgub 2018. Hal ini merupakan tugas yang sulit bagi KPU Kota Medan dalam merumuskan formula untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih disabilitas pada Pemilu atau Pilkada selanjutnya.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis tentang Peran Relasi basis pemilih disabilitas dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan pada Pemilu 2019 dapat disimpulkan bahwa Relasi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan demokrasi dan kepemiluan kepada basis pemilih disabilitas melalui kegiatan sosialisasi. Sebagai penyuluh Pemilu, Relasi selalu berpegang pada kode etik yang sudah ditetapkan yang tertuang dalam lembar SK Kerja.

Peran Relasi dinilai sudah cukup baik dibuktikan dengan terciptanya hubungan antara Relasi dan Pemilih disabilitas yang mau terbuka tentang persoalan Pemilu dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilih disabilitas yang mungkin selama ini ada keengganan untuk dikomunikasikan dengan orang lain. Hasil interaksi pun dinilai cukup positif sehingga proses sosialisasi dapat tercapai dan relatif lancar. Disamping itu semakin meningkatnya kepercayaan pemilih disabilitas terhadap proses demokrasi dengan menyatakan akan siap hadir pada hari pemilihan.

Pola sosialisasi Relasi sudah cukup bagus dan diyakini dapat menarik perhatian pemilih disabilitas apalagi diselingi dengan hadiah-hadiah ringan dan uang transport. Materi-materi yang diajarkan sangat relevan dengan berbagai persoalan-persoalan yang

dihadapi pemilih disabilitas dalam memilih dan penerimaannya dinilai cukup baik.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Medan masih relatif kecil tidak sampai setengah dari DPT walaupun angkanya lebih besar dibandingkan Pilgub 2018. Hal ini mengindikasikan program Relasi harus tetap konsisten dilaksanakan tinggal pengembangan konsep dan pendekatan yang perlu sempurnakan.

## 6. Saran

- a. Masa kerja Relasi cukup singkat yakni hanya tiga bulan. Masa ini dinilai terlalu singkat dalam rangka membentuk persepsi masyarakat untuk memilih yang jika dihubungkan dengan dinamika politik dan kasus-kasus korupsi yang memberi kontribusi persepsi negatif pada setiap gelaran Pemilu.
- b. Volume bimbingan teknis oleh KPU Kota Medan kepada Relasi perlu ditingkatkan dalam rangka memperdalam dan mempertajam wawasan dan pengetahuan Relasi serta sebagai sarana diskusi evaluasi pencapaian periodik atas kinerja Relasi.

## Referensi

- [1] <https://kpud-medankota.go.id/menakar-kadar-partisipasi-pemilih-di-kota-medan-dalam-menyongsong-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-tahun-2020/>
- [2] <https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>
- [3] <https://litigasi.co.id/kpu-medan-rekrut-relawan-demokrasi>
- [4] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- [5] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- [6] Sudarsono, E. (1994). Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [7] Haryanto. (2018). Sosialisasi Politik : Suatu Pemahaman Awal. Yogyakarta : PolGov.
- [8] Moleong, J, Lexy. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [9] Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, (1994), Partisipasi Politik di Negara Berkembang, terj. Sahat Simamora, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [10] Merphin Panjaitan. (2011), Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara, Jakarta: Permata Aksara.
- [11] Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.
- [12] KPU RI, Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019.
- [13] NKPU Kota Medan, Pengumuman Nomor 80/PP.05-Pu/1271/KPU-Kot/I/2019 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Tingkat Kota Medan.
- [14] Sarlito Wirawan Sarwono, (2015), Teori- Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers.